

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Rumah merupakan sebuah kebutuhan primer yang harus dipenuhi oleh setiap manusia dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Kebutuhan primer tersebut wajib terpenuhi dengan tujuan agar manusia dapat menjadikan rumah sebagai tempat berlindung dan tempat beraktivitas. Maka dari itu rumah menjadi kebutuhan primer yang tidak hanya berupa bangunan fisik yang dinilai secara estetika, namun juga memiliki kualitas yang bisa ditetapkan atau dikategorikan sebagai rumah yang layak huni untuk ditinggali oleh pemiliknya.

Sebagai salah satu negara yang memiliki populasi penduduk kategori tinggi yang ada di dunia, tentu saja Indonesia memiliki banyak permasalahan, salah satunya adalah kemiskinan, kemiskinan yang dialami oleh masyarakat berakibat pada ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan primer maupun sekunder yang ada dalam hidupnya, kebutuhan primer berupa sandang, pangan dan papan yang seharusnya terpenuhi menjadi faktor utama kenapa orang tersebut dikategorikan miskin, hal tersebut didasari oleh penghasilan utama ditekankan untuk memenuhi kebutuhan pangan, selanjutnya mengenai kebutuhan sandang manusia cenderung memiliki pakaian yang masih dapat digunakan dan terkait pemenuhan kebutuhan papan atau tempat tinggal manusia masih mendapati kesulitan untuk memenuhinya (Ardi Adji, 2020).

Dalam upaya pengetasan kemiskinan pemerintah memiliki peran yang sangat penting, hal itu salah satunya tercantum dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945 pasal 28 H yang menjelaskan mengenai hak setiap warga negara untuk bertempat tinggal, mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat. Lebih jelas pembahasan mengenai hunian layak bagi setiap warga negara juga dijelaskan melalui Undang-Undang No. 1 tahun 2011 yang menyebutkan mengenai perumahan dan kawasan pemukiman, dinyatakan bahwa negara memiliki tanggung jawab untuk melindungi segenap bangsa melalui penyelenggaraan perumahan dan kawasan pemukiman agar warga negara dapat bertempat tinggal dan menghuni rumah yang layak dengan tujuan untuk mewujudkan lingkungan yang sehat, aman, dan harmonis serta berkelanjutan.

Dalam upaya pengentasan kemiskinan yang ada di Indonesia dan sebagai bentuk pelaksanaan dari peraturan perundang-undangan yang telah berlaku, pemerintah membuat sebuah kebijakan yang disebut dengan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni bagi masyarakat yang masih dirasa kurang mampu memenuhi kebutuhan papan mereka. Program atau kebijakan tersebut kemudian diperjelas melalui peraturan Menteri sosial nomor 20 tahun 2017 tentang Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni dan Sarana Prasarana Lingkungan (Adar BakhshBaloch, 2017).

Rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni merupakan suatu program pemerintah yang ditunjukkan kepada rumah tangga miskin yang rumahnya tidak memenuhi stadarisasi perumahan layak huni, hal ini bertujuan agar

keluarga tersebut dapat meningkatkan taraf hidup mereka dan memiliki perumahan yang sesuai standar dengan cara yang benar. Program rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni ini memiliki dua sasaran utama yaitu penduduk miskin di daerah pelosok dan juga penduduk miskin di daerah perkotaan yang memiliki rumah tidak layak huni atau ditinggali (Rahmayanti, 2022).

Sesuai dengan peraturan menteri sosial tujuan daripada rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni ini meliputi upaya untuk mengembalikan keberfungsian sosial dan meningkatkan kualitas tempat tinggal fakir miskin melalui perbaikan kondisi rumah dan atau sarana prasarana lingkungan baik secara menyeluruh maupun sebagian dengan menggunakan semangat kebersamaan, kegotongroyongan, dan nilai kesetiakawanan sosial masyarakat.

Program bantuan yang berfokus dalam rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni ini juga terdapat di daerah-daerah yang dapat menggunakan dana alokasi khususnya untuk melaksanakan program ini, dalam hal yang akan dibahas program di daerah bernama program bantuan pemugaran rumah dan jambanisasi dana alokasi khusus, sesuai namanya program ini menggunakan dana alokasi khusus sebagai upaya implementasinya

Dalam pelaksanaannya program bantuan pemugaran rumah dan jambanisasi dana alokasi khusus mengalami beberapa kendala yang menjadi sebuah permasalahan sehingga mempengaruhi citra dari program ini,

banyak hal yang dikeluhkan masyarakat terutama oleh mereka yang menerima bantuan, permasalahan ini terdapat pada peletakan plakat atau label program bantuan yang di tempel pada masing-masing rumah penerima bantuan.

Peletakan plakat atau label bantuan yang ditempel pada dinding rumah penerima bantuan dirasa kurang sesuai karena dalam proses pembangunan ataupun renovasi rumah biaya sepenuhnya tidak di bayar oleh program bantuan dan nominal yang diberikan juga tidak seberapa, sehingga pemilik rumah yang mendapatkan bantuan harus mempersiapkan uang untuk tambahan pembangunan rumah tersebut. Hal tersebut yang menjadi akar permasalahan tentang mengapa harus ada peletakan plakat bantuan di dinding rumah penerima bantuan sedangkan dalam proses pembangunan ataupun renovasi biayanya bukan bersumber dari satu pihak saja.

Permasalahan yang berkaitan dengan peletakan plakat program bantuan pemugaran rumah inilah yang sering dikeluhkan oleh penerima bantuan, selain karena adanya tambahan biaya dari pemilik rumah atau disini adalah penerima bantuan, plakat itu juga berpengaruh terhadap pandangan masyarakat kepada pemilik rumah yang merujuk kepada identitas sosial dalam kehidupan bermasyarakat.

Dalam hubungan bermasyarakat, masyarakat satu dengan masyarakat lainnya memiliki interaksi yang bagus dalam menunjang kehidupannya satu sama lain atau dalam artian saling membantu. Hal ini yang membentuk interaksi antara individu dengan individu, individu

dengan kelompok maupun kelompok dengan kelompok dalam kehidupan sehari-hari merupakan suatu hal yang lazim dilakukan, mengingat manusia merupakan makhluk sosial yang tentunya tidak dapat hidup sendiri, saling membutuhkan dan dibutuhkan (Astutik, 2013).

Dalam interaksi sosial yang dilakukan oleh masyarakat tersebut ternyata tidak selamanya memiliki dampak yang baik seperti saling membantu atau tolong menolong, dalam kehidupan bermasyarakat interaksi sosial juga dapat memberikan dampak yang buruk sehingga berujung kepada stigma yang sering dianggap negatif yang ditunjukkan kepada salah satu pihak. Stigma sendiri merupakan sesuatu hal yang dapat muncul jika terdapat suatu kondisi yang dianggap berbeda atau tidak sesuai dengan standar normalitas suatu tempat (Varamitha et al., 2016). Hal inilah yang memunculkan beberapa masalah sehingga merusak citra dari interaksi sosial di masyarakat yang sebelumnya dijalankan dengan baik dan penuh harmonisasi antar anggota masyarakat namun berujung terbalik dan memunculkan stigma negatif tersebut.

Permasalahan mengenai plakat atau label yang ditempel pada dinding rumah ini didasari oleh pembiayaan dalam program bantuan pemugaran rumah dana alokasi khusus yang berakibat kepada identitas sosial penerima bantuan ini muncul akibat dari stigma yang dilakukan oleh beberapa kalangan masyarakat yang menganggap rendah penerima bantuan, sedangkan penerima bantuan merasa tidak adil karena dalam pembiayaan dari program bantuan ini mereka juga mengeluarkan biaya yang jumlahnya

bisa dibilang lebih besar daripada jumlah bantuan yang diberikan oleh program tersebut.

Munculnya rasa ketidakpuasan yang dialami oleh penerima bantuan ini didasari oleh stigma masyarakat sekitar tentang identitas sosial penerima bantuan dalam kehidupan sosial bermasyarakat. Dimana identitas sosial sendiri sering didefinisikan sebagai salah satu point penting yang berkaitan dengan citra individu dalam kehidupan bermasyarakat, identitas sosial menjadi hal penting karena dasar individu adalah orang sosial yang selalu berbau dan memiliki hubungan yang erat dengan individu lain, kelompok dan lingkungannya. Sehingga permasalahan yang berkaitan dengan kehidupan sosial bermasyarakat memiliki dampak yang cukup besar dirasakan oleh penerima bantuan program tersebut.

Pelaksanaan program bantuan pemugaran rumah dana alokasi khusus yang memunculkan banyak permasalahan selama proses pelaksanaannya hingga berdampak kepada kehidupan sosial bermasyarakat yang dirasakan oleh penerima bantuan menjadi hal yang perlu diperhatikan, dimana peletakan plakat program bantuan tersebut perlu dikaji ulang dalam kebijakan berikutnya sehingga dampak yang diakibatkan oleh program ini dapat diminimalisir sebagai upaya yang positif untuk keberlangsungan program serupa yang akan dilakukan kedepannya dan diharapkan juga dapat menjaga harmonisasi kehidupan sosial dalam masyarakat di wilayah Desa Sempu Kecamatan Ngancar, Kabupaten Kediri.

Maka dengan melihat permasalahan yang terjadi sesuai uraian yang sudah dijelaskan diatas, maka penulis memutuskan untuk melaksanakan penelitian yang berkaitan dengan program rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni dengan judul “Analisis Dampak Sosial Pemberian Label Program Rehabilitasi Bantuan Pemugaran Rumah Dana Alokasi Khusus Di Desa Sempu Kecamatan Ngancar Kabupaten Kediri”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan pada latar belakang penelitian maka dapat dirumuskan masalah mengenai bagaimana dampak sosial yang dirasakan oleh penerima program mengenai pemberian label pada program bantuan pemugaran rumah dana alokasi khusus di Desa Sempu Kecamatan Ngancar Kabupaten Kediri?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pernyataan masalah yang telah dirumuskan diatas, penelitian ini memiliki tujuan untuk mendeskripsikan mengenai bagaimana dampak sosial yang diakibatkan oleh adanya label program bantuan pemugaran rumah dana alokasi khusus yang terjadi di Desa Sempu, Kecamatan Ngancar, Kabupaten Kediri.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadi bahan referensi dan sumber informasi yang bisa diakses atau diperoleh untuk meningkatkan pengetahuan mengenai program bantuan pemugaran

rumah dan jambanisasi dana alokasi khusus serta dapat dijadikan referensi dalam penelitian lain dengan tujuan untuk dijadikan bahan rujukan bagi penelitian yang akan dilakukan.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan kajian atau referensi bagi para pengambil keputusan atau pihak terkait mengenai penetapan kebijakan yang berkaitan dengan upaya-upaya atau peningkatan keberhasilan program bantuan pemugaran rumah dana alokasi khusus yang akan terus berjalan sebagai salah satu upaya pengetasan kemiskinan yang ada di Indonesia.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Adapun ruang lingkup yang akan diteliti adalah sebagai berikut :

1. Profil Desa Sempu Kecamatan Ngancar Kabupaten Kediri
2. Profil Program Bantuan Pemugaran Rumah dan Jambanisasi Dana Alokasi Khusus
3. Profil Masyarakat Penerima Program Bantuan
4. Dampak Sosial Pemberian Label Program Pemugaran Rumah Dana Alokasi Khusus